

EXECUTIVE SUMMARY

KAJIAN IDENTIFIKASI KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN DI KOTA SURAKARTA

I PENDAHULUAN

Kota Surakarta menempati posisi penting sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dan sosial yang berlangsung dalam dua dekade terakhir didorong oleh peningkatan infrastruktur, pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, serta inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Kemajuan tersebut menghasilkan capaian pembangunan yang cukup menggembirakan, namun belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah administratif.

Disparitas kesejahteraan masih menjadi persoalan mendasar yang mengemuka. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta dari 83,54 pada tahun 2023 menjadi 84,41 pada 2024 mencerminkan kemajuan di sisi makro. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ketimpangan antara wilayah seperti Banjarsari yang unggul dalam berbagai indikator pembangunan, dengan kecamatan lain seperti Jebres atau Serengan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berjalan secara inklusif dan merata. Ketimpangan ini juga berdampak pada keterbatasan akses layanan dasar, rendahnya mobilitas sosial, serta melemahnya kohesi sosial antarwilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan hasil pembangunan masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah pinggiran kota. Pembangunan yang terpusat pada kawasan inti mendorong ketidakseimbangan spasial, sementara kelompok rentan di wilayah perifer sering kali belum terjangkau oleh kebijakan atau program yang efektif. Lemahnya integrasi lintas sektor, keterbatasan data mikro spasial, serta partisipasi publik yang belum optimal memperparah kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi.

Kajian ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan landasan analisis berbasis bukti dalam penyusunan kebijakan yang adil dan responsif terhadap persoalan ketimpangan kesejahteraan. Kajian ini disusun melalui pendekatan multidimensi dan spasial, dengan memetakan kondisi faktual secara menyeluruh hingga tingkat kelurahan, mengidentifikasi penyebab ketimpangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan kontekstual. Pendekatan ini

diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan kota yang lebih berpihak kepada kelompok dan wilayah yang selama ini tertinggal.

Kegiatan kajian meliputi lima ruang lingkup utama, yaitu:

1. Pemetaan ketimpangan kesejahteraan secara spasial berdasarkan indikator sosial-ekonomi,
2. Analisis terhadap faktor-faktor struktural yang memengaruhi ketimpangan, seperti distribusi sumber daya dan akses layanan dasar,
3. Pengkajian dampak ketimpangan terhadap kualitas pembangunan kota secara menyeluruh,
4. Evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan yang telah dijalankan
5. Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Surakarta.

Landasan hukum penyusunan kajian ini bersumber pada berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk perundang-undangan tentang hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, serta penanggulangan kemiskinan. Selain itu, terdapat juga rujukan pada sejumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Surakarta yang relevan dalam konteks perencanaan, kelembagaan, dan penganggaran pembangunan daerah.

Melalui kajian ini, diharapkan terbangun pemahaman yang utuh mengenai peta ketimpangan kesejahteraan di Surakarta, sehingga pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih adil, efektif, dan inklusif. Ke depan, pembangunan kota tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin hak setiap warga untuk hidup sejahtera tanpa tertinggal oleh kemajuan.

II METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif bersumber dari dokumen resmi seperti publikasi BPS, RPJMD, dan Renstra OPD. Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (*FGD*) yang melibatkan pemangku kepentingan lokal.

Pendekatan multidimensi diterapkan untuk memahami ketimpangan secara utuh, mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Perspektif spasial digunakan

untuk memetakan variasi kesejahteraan antarwilayah, khususnya di tingkat kelurahan. Analisis dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu analisis tematik untuk isu-isu utama, analisis spasial terhadap distribusi ketimpangan, dan analisis deskriptif terhadap indikator kesejahteraan.

Data dianalisis secara terpadu dengan metode reduksi informasi, triangulasi, serta meta-analisis terhadap studi terdahulu. Seluruh proses diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual guna mendukung penyusunan kebijakan yang responsif, adil, dan berbasis bukti.

III SITUASI KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN DI KOTA SURAKARTA

Kondisi ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagian warga telah mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang layak. Sementara itu, kelompok lain masih merasakan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan tersebut menciptakan kesenjangan antarkelompok sosial dan antarwilayah yang terus melebar, terutama antara kawasan pusat kota dan daerah pinggiran.

Disparitas paling mencolok terlihat pada aspek ekonomi rumah tangga. Warga yang memiliki pekerjaan tetap cenderung mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak, dan menjaga kesehatan keluarga. Sebaliknya, masyarakat dengan pendapatan tidak menentu menghadapi risiko keterbatasan gizi, pendidikan yang terputus, serta ketergantungan pada bantuan sosial. Program bantuan yang tersedia belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan rentan, sementara tekanan ekonomi terus meningkat seiring kenaikan garis kemiskinan.

Kesenjangan ekonomi turut berpengaruh terhadap peluang pendidikan. Anak-anak dari keluarga berada lebih mudah mengakses sekolah berkualitas dan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran, sedangkan anak-anak dari keluarga miskin harus menghadapi kendala biaya, keterbatasan sarana, dan kualitas sekolah yang rendah. Lingkungan pendidikan yang tidak setara ini mengakibatkan ketimpangan kompetensi dan memperkecil peluang mobilitas sosial, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan antargenerasi.

Akses terhadap layanan kesehatan pun menunjukkan pola ketimpangan yang sama. Wilayah pusat kota memiliki fasilitas medis yang lebih lengkap dan berkualitas, sedangkan daerah pinggiran masih menghadapi kendala geografis, biaya, dan mutu pelayanan. Ketimpangan

layanan kesehatan memperburuk kondisi kelompok rentan dan menambah beban rumah tangga miskin.

Kualitas lingkungan permukiman juga menjadi indikator nyata ketimpangan. Kawasan padat penduduk umumnya kekurangan ruang terbuka, saluran air bersih, serta tempat tinggal yang layak. Permukiman sempit, rawan banjir, dan sanitasi yang buruk memperburuk kualitas hidup, baik secara fisik maupun mental. Lingkungan yang tertata dan aman hanya dapat diakses oleh sebagian kecil warga kota. Ketidakseimbangan ini memperdalam rasa keterpinggiran dan membentuk ketidaksetaraan dalam pengalaman hidup masyarakat urban.

Meskipun Pemerintah Kota Surakarta telah menjalankan berbagai program untuk mengurangi ketimpangan, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, hasilnya belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Tantangan seperti lemahnya integrasi lintas sektor, minimnya pelibatan warga dalam perencanaan, serta keterbatasan data mikro berbasis wilayah menghambat efektivitas intervensi. Ketimpangan di Surakarta tidak hanya soal akses, tetapi juga menyangkut perasaan tertinggal dan kehilangan kendali atas masa depan. Kondisi ini menuntut strategi baru yang berbasis bukti, kontekstual, dan berakar pada partisipasi aktif masyarakat.

IV TEMUAN TEMATIK DAN ANALISIS STRUKTURAL

Ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta mencerminkan masalah yang tidak hanya bersifat spasial, tetapi juga melekat secara struktural. Pembangunan yang terfokus di wilayah inti seperti Banjarsari dan Laweyan telah menciptakan kesenjangan signifikan dengan wilayah pinggiran seperti Jebres, Serengan, dan Pasar Kliwon. Konsentrasi fasilitas publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi di pusat kota telah memperkuat dominasi wilayah inti, sementara kawasan lain tertinggal secara sistemik dalam akses layanan dasar, transportasi, hingga konektivitas digital.

Beberapa tema ketimpangan yang menonjol mencakup disparitas dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan kepemilikan aset. Anak-anak dari keluarga berada memperoleh akses terhadap sekolah bermutu dan lingkungan belajar yang mendukung, sementara anak-anak di lingkungan miskin menghadapi berbagai hambatan.

Ketimpangan ekonomi diperparah oleh dominasi sektor informal di wilayah tertentu. Banyak warga menggantungkan hidup pada pekerjaan harian tanpa jaminan kerja, tabungan, maupun aset produktif. Situasi ini membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama ketika belum tercakup dalam perlindungan sosial formal. Perbedaan dalam kepemilikan tanah, rumah, dan akses terhadap modal juga menciptakan ketimpangan antar kelompok dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan.

Situasi ini diperkuat oleh kerangka struktural yang tidak berpihak pada pemerataan.

1. Pola pembangunan masih mengikuti logika *core-periphery*, di mana wilayah inti menyerap investasi, fasilitas, dan perhatian kebijakan lebih besar, sementara wilayah perifer dibiarkan berkembang sendiri dengan keterbatasan infrastruktur dasar. Model ini menciptakan segregasi spasial dan memperlemah kohesi kota secara keseluruhan.
2. Tata kelola pembangunan masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal, perencanaan belum berbasis data mikro wilayah, dan keterlibatan masyarakat masih minim. Ketiadaan sistem evaluasi yang konsisten membuat banyak program tidak berjalan efektif, terutama bagi kelompok rentan yang paling membutuhkan.
3. Urbanisasi berlangsung tanpa pemerataan infrastruktur. Ekspansi permukiman tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi publik. Banyak warga tinggal di kawasan padat dan tidak layak huni, yang memperburuk kualitas hidup dan menambah beban keseharian mereka.
4. Sistem data kesejahteraan belum mengakomodasi indikator multidimensi dan spasial. Ketergantungan pada data agregat seperti IPM dan angka kemiskinan kota menutupi ketimpangan nyata di tingkat kelurahan. Banyak warga yang secara statistik tidak tergolong miskin, tetapi hidup dalam keterbatasan akut akses pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sehat.
5. Stagnasi mobilitas sosial muncul karena ketimpangan peluang yang terus berulang. Anak-anak dari keluarga miskin tetap berada dalam lingkaran pekerjaan rentan dan penghasilan rendah. Ketidakhadiran program transisi yang menghubungkan pendidikan dengan pekerjaan produktif membuat mereka sulit keluar dari perangkap ketimpangan.

Ketimpangan di Kota Surakarta bukan semata-mata disebabkan oleh dinamika pasar atau kondisi geografis yang alami, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam arah dan tata kelola pembangunan yang belum menjunjung prinsip keadilan. Upaya mengatasi persoalan ini menuntut perubahan kebijakan yang berpihak pada desentralisasi pembangunan, alokasi sumber daya secara merata, penguatan basis data spasial berskala mikro, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Pendekatan perencanaan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi kunci agar pertumbuhan kota dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak, serta berlangsung secara berkelanjutan.

V KESIMPULAN DAN SARAN

Ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta merupakan tantangan multidimensi yang mencakup persoalan ekonomi, sosial, spasial, dan kelembagaan. Peningkatan indikator pembangunan secara makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan IPM, belum mencerminkan realitas mikro di lapangan, terutama di tingkat kelurahan. Ketimpangan terlihat dalam perbedaan akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, pekerjaan layak, dan pendidikan antara wilayah inti kota dan kawasan pinggiran.

Pola pembangunan yang terpusat telah mempercepat kemajuan kecamatan seperti Banjarsari dan Laweyan, namun meninggalkan daerah seperti Jebres, Serengan, dan Pasar Kliwon dalam kondisi tertinggal. Keterbatasan mobilitas sosial, lemahnya perlindungan sosial bagi pekerja informal, eksklusi dalam ruang kota, serta rendahnya partisipasi kelompok rentan menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan antarkelompok dan antarwilayah. Sistem tata kelola yang belum terkoordinasi dengan baik antar sektor, serta kurangnya data spasial dan indikator multidimensi, membuat intervensi kebijakan belum berjalan efektif.

Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dan data lokal dalam menyusun kebijakan. Pemerintah daerah perlu beralih dari model pertumbuhan terpusat ke arah perencanaan yang menekankan keadilan spasial, keberpihakan terhadap kelompok marjinal, dan kolaborasi lintas aktor pembangunan. Kajian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan secara menyeluruh.

Beberapa rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan yang dihasilkan adalah:

1. Pemerintah perlu memperluas akses terhadap modal produktif berbasis komunitas bagi kelompok miskin dan rentan. Program bantuan tidak lagi berbasis konsumsi semata, tetapi diarahkan pada asset-based empowerment, seperti hibah alat usaha, pelatihan kewirausahaan, dan koperasi kelurahan. Pendekatan inklusif seperti bank sampah, tabungan kelompok, atau wirausaha ibu rumah tangga juga bisa diperluas. Intervensi ini penting untuk memutus ketergantungan pada sektor informal dan meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga.
2. Intervensi pendidikan tidak cukup hanya pada aspek fisik (sekolah, seragam), tetapi harus menyentuh motivasi, aspirasi, dan pendampingan anak dari keluarga miskin. Pemerintah bisa mengembangkan program Mentoring Anak RW, Beasiswa Non-Akademik, dan Sekolah Masa Depan yang dirancang oleh kader lokal dan relawan pendidikan. Intervensi zonasi perlu dievaluasi dan diperluas agar anak-anak dari kelurahan padat bisa tetap masuk sekolah negeri berkualitas di luar zona.
3. Pemerintah Kota harus mendorong skema perlindungan sosial yang inklusif dan fleksibel. Banyak pekerja serabutan dan informal tidak tercakup dalam jaminan BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan karena kendala administrasi. Solusinya adalah penerbitan "Kartu Pekerja Rentan" di tingkat kota yang menghubungkan mereka dengan subsidi BPJS, akses pelatihan kerja, dan pendampingan legal formal. Selain itu, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di kecamatan rentan.
4. Untuk menjamin layanan dasar yang merata, perlu ada program ProSanitasi RW dan Air Bersih Berbasis Komunitas di wilayah seperti Panularan dan Mojosongo. Warga bisa didorong membentuk kelompok kerja sanitasi dengan pendampingan teknis dari Dinas PU dan bantuan hibah dari CSR. Di samping itu, layanan air bersih PDAM harus diperluas hingga ke kawasan padat yang saat ini masih bergantung pada sumur dangkal. Pemerintah juga harus mempercepat program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) berbasis warga.
5. Kesenjangan dalam partisipasi sosial perlu dijawab dengan revitalisasi lembaga sosial kampung seperti PKK, Karang Taruna, dan Posyandu. Warga yang semula pasif bisa

diaktivasi melalui pelatihan partisipatif, pelibatan dalam musyawarah kelurahan, dan kegiatan komunitas tematik (misal: koperasi ibu tunggal, komunitas difabel, pemuda anti putus sekolah). Diperlukan pendamping sosial lokal di setiap kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung antara warga dan layanan pemerintah.

6. Perempuan menjadi aktor kunci dalam ketahanan keluarga dan ekonomi, tetapi masih menghadapi hambatan kultural, status hukum, dan akses terhadap peluang. Maka, diperlukan program afirmatif seperti Modal Usaha Perempuan Kepala Keluarga, Pusat Konseling Perempuan, dan Beasiswa Anak Perempuan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan atau stigma sosial (seperti janda muda atau ibu tunggal) perlu dijamin melalui regulasi tingkat kota dan peran aktif P2TP2A.
7. Memutus siklus ketimpangan jangka panjang, penting membangun ekosistem mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi, pelatihan teknologi, dan program pemuda pemutus kemiskinan. Pemerintah bisa menciptakan Program Afirmasi Kuliah RW, Magang Komunitas, atau Digital Fellowship Anak Miskin Kota. Harapan harus diperkuat lewat narasi kolektif, keterlibatan tokoh teladan lokal, dan akses pada impian hidup yang realistis namun progresif.

Adapun saran bagi para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Kepada **Pemerintah Daerah Kota Surakarta**
Perlu menyusun ulang kebijakan pembangunan kota dengan pendekatan spasial yang lebih adil, termasuk afirmasi anggaran untuk kelurahan-kelurahan yang tertinggal serta pengembangan indikator kesejahteraan multidimensi sebagai dasar perencanaan.
2. Kepada **BAPPEDA dan BRIDA Kota Surakarta**
Disarankan untuk mengembangkan sistem informasi geospasial kesejahteraan (SIG-Kesejahteraan) berbasis kelurahan, guna memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti dan memudahkan pemantauan program secara real-time.
3. Kepada **Akademisi dan Peneliti**
Perlu dilakukan kajian lanjutan terkait hubungan antara ketimpangan spasial dan mobilitas sosial di Surakarta, serta uji kebijakan melalui simulasi spasial dan pendekatan kuantitatif berbasis data longitudinal.

4. Kepada **Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas Lokal**

Didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program kesejahteraan, serta memperkuat advokasi atas hak-hak warga miskin kota dalam memperoleh layanan dasar yang setara.

5. Kepada **Pemerintah Provinsi dan Nasional**

Penting untuk mereplikasi pendekatan pemetaan ketimpangan dan kolaboratif yang dilakukan di Surakarta sebagai model praktik baik untuk diterapkan di kota-kota sekunder lainnya di Indonesia.